



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : HAKIM KONSTITUSI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Wahiduddin Adams
2. Jabatan : HAKIM KONSTITUSI
3. NHK : 108089

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.350.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 161 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 216 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/57 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
4. Tanah Seluas 8.925 m2 di KAB / KOTA OGAN KOMERING ILIR, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
5. Tanah Seluas 5.704 m2 di KAB / KOTA OGAN KOMERING ILIR, HASIL SENDIRI Rp. 45.500.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
7. Tanah Seluas 353 m2 di KAB / KOTA OGAN KOMERING ILIR, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 300.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 73.109.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. 2.250.000.000**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 7.480.301.179**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 13.453.910.179



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 13.453.910.179

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.